

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutedi, A. (2014) *sertifikat atas tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Murad, R. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 1991
- Ma'ruf, U. (2014) *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*, UNISSULA Press, Semarang
- Hamzah. *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Rineka Cipta, 1991, Jakarta
- Harsono, B. (2008) *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi serta pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta,
- Mochtar Kusumaatmadja, (2018) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Isi, serta pelaksanaan UUPA*, Bandung: Alumni, hal. 112–152.
- Endang (2020) *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta
- Isnaini (2022) *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan
- Politik Hukum Pertanahan : Paradigma, Kebijakan, dan Dinamika Kontermperer. (2026). (n.p.): CV Eureka Media Aksara.
- Adrian Sutedi, S. H. M. H. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Pperundang-undangan

- UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU *Rechtreglement voor de Buitengewesten*. (Rbg.)
- KUHPerdata, Pasal 118 serta Pasal 124 HIR,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39285/kuhperdata>
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138)

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 1997)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18)

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 huruf a,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5720/pp-no-24-tahun-1997>

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1),
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53409/pp-no-24-tahun-1997>

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
 Pasal 19 ayat (1)–(2) huruf c,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38885/uu-no-5-tahun-1960>

Jurnal

A. Dilapanga, Reynaldi, ‘Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960’, *Lex Crimen*, VI.5 (2017), p. 138 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>

Anggriawan, Teddy Prima, Farizza Taralita, Arrachma Fachrezzi, and Uzlifatus Dea, ‘The Urgency of Legal Aid in Online Dispute Resolution in the Modernization Era’, 4.6 (2024), pp. 2553–60

Anggriawan, Teddy Prima, Shinfani Kartika Wardhani, and Donny Yuhendra Wibiantoro, ‘Kedudukan Prinsip Imparsialitas Atas Gugatan Vexatious Dalam Penegakan Hukum Pada Proses Mediasi’, 6.2 (2024), pp. 7395–7405

Chusnida, Nabilah Luhtfiyah, and Teddy Prima Anggriawan, ‘DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF CHILDREN ’ S RIGHTS : BEST INTEREST OF THE CHILDREN ABSTRACT’, 20.3 (2022), pp. 295–310

Ismail, Ilyas, ‘Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 56.14 (2012), pp. 1–11

Lebe, Estefania G., ‘Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan’, *Lex Privatum*, 9.5 (2021), pp. 5–13

Marsella, ‘Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional’, *Penegakan Hukum*, 2.2 (2015), pp. 101–7

- NINGRUM, HERLINA RATNA SAMBAWA, 'Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014), p. 219, doi:10.26532/jph.v1i2.1481
- Nur Amrin, Reza, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, and Gita Cahyani Maulida, 'Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam', *Tunas Agraria*, 5.1 (2022), pp. 65–76, doi:10.31292/jta.v5i1.168
- Rasyid, Muhammad Ridwan, and Atik Winanti, 'Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.4 (2023), p. 2271, doi:10.35931/aq.v17i4.2366
- Salim, Agus, 'Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda', *Jurnal Usm Law Review*, 2.2 (2019), pp. 174–87, doi:10.26623/julr.v2i2.2269
- Untuk, Diajukan, Memenuhi Persyaratan, Program Kekhususan, Hukum Perdata, and Putri Cahya Ardiyaningtyas, 'PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI (Studi Kasus Di Kantor BPN Kabupaten Demak)', 2023
- Usup, Muhammad Safir Ramadhan, 'PENGATURAN HUKUM TENTANG TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN HAK PAKAI DITINJAU DARI PP No. 10 TAHUN 1996 TENTANG HGU, HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH', *Lex Crimen*, 7.6 (2018), pp. 58–65
- Wijaya, Alvian Dwiangga, and Teddy Prima Anggriawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone', 3 (2022), pp. 63–72
- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48-60.
- Anggriawan, T. P., Wardhani, S. K., & Wibiantoro, D. Y. (2023). Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi. *UNES Law Review*, 6(2), 7395-7405.
- Chusnida, N. L., & Anggriawan, T. P. (2022). Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 295.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Matarram Nomor: 138/Pdt/2020/Pt Mtr

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 65/PDT.G/2019/PN Rbi, 2019, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Kusnanto, (2019) *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Hak Atas Tanah Dalam Hal Terbisa Sertipikat Ganda”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal

Alisiza Nur Aziyah, (2021) *“Penyelesaian Terhadap Sertifikat Tanah Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan”* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang

BRIAN RIZQI PRASETYA (2023) *“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Selaku bukti Hak Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Pati”* Tesis, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang